**PERBANDINGAN PENGATURAN PENYELESAIAN HUKUM
PIDANA PERKARA KEKERASAN SEKSUAL : PERSETUBUHAN
ORANG TUA DENGAN ANAK KANDUNG ANTARA INDONESIA
DAN SWEDIA**

Aburizal Winarno¹, Ahmad Dicky Arjunanda², Ach Adila Rakha Pm³
aburizal@gmail.com¹, arjunanda1959@gmail.com², rakap6740@gmail.com³
Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak: Kasus persetubuhan antara orang tua dan anak kandung (incest) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis, serta menantang efektivitas penegakan hukum pidana. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia, tetapi juga muncul di berbagai negara, termasuk Swedia, yang dikenal memiliki sistem hukum pidana progresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terkait incest di Indonesia dan Swedia, serta membandingkan mekanisme penyelesaian perkara di kedua negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi KUHP Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Brottsbalken (Swedish Criminal Code) Bab 6 tentang Tindak Pidana Seksual, ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur incest sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana berat, terutama jika pelaku merupakan orang tua atau wali korban. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala berupa rendahnya angka pelaporan, perlindungan korban yang belum optimal, serta stigma sosial. Sebaliknya, Swedia memiliki sistem yang lebih komprehensif, dengan regulasi yang jelas mengenai incest, mekanisme pendampingan hukum korban melalui målsägandebitråde, serta penekanan pada rehabilitasi psikologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun Indonesia dan Swedia sama-sama mengkriminalisasi incest, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek perlindungan korban dan mekanisme penyelesaian perkara. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya Indonesia memperkuat perlindungan korban, memperluas akses layanan pendampingan hukum, serta mempertimbangkan praktik baik dari Swedia dalam penanganan kasus incest.

Kata Kunci: Incest, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, Indonesia, Swedia.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat. Apabila kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, maka pelanggaran ini menyentuh aspek paling mendasar dalam moralitas manusia serta prinsip-prinsip utama perlindungan anak. Tindak kejahatan incest, yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak kandung, tidak hanya menyebabkan kerusakan secara fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga menghancurkan integritas keluarga sebagai institusi sosial yang seharusnya menjadi tempat perlindungan yang utama bagi anak.

Kejahatan incest merupakan bentuk kekerasan seksual yang tergolong ke dalam *intrafamilial sexual abuse*. Hubungan biologis dan emosional antara pelaku dan korban menimbulkan kerentanan ganda: pertama, karena korban memiliki ikatan kepercayaan dan ketergantungan kepada pelaku; kedua, karena pelaku memanfaatkan posisi kuasa untuk mengintimidasi atau memanipulasi korban agar tetap bungkam. Dalam hal ini, setiap sistem hukum pidana di berbagai negara berkewajiban memberikan respons yang tegas terhadap kasus-kasus seperti ini, antara lain dengan menetapkan aturan-aturan substantif dan menyediakan mekanisme perlindungan korban yang menyeluruh.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana incest terdapat dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP lama, yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, yang ada di bawah kekuasaannya, karena hubungan keluarga, wali, atau karena pengawasan, dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Pasal ini menitikberatkan pada aspek pengawasan atau relasi kekuasaan, dan bukan semata-mata pada hubungan darah. Dengan demikian, konstruksi norma ini bersifat terbatas, karena hanya menjangkau korban yang berada “di bawah kekuasaan” pelaku, serta menekankan batasan usia sebagai syarat pemidanaan. Padahal, dalam kasus-kasus incest, relasi kuasa tidak hanya terjadi karena status formal seperti wali atau pengawas, melainkan juga karena hubungan emosional dan struktural antara orang tua dan anak. Meskipun telah ada pembaruan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun dalam praktiknya, KUHP lama masih dijadikan dasar dalam banyak penyelesaian kasus. Proses hukum yang panjang, budaya patriarki, dan rendahnya kepekaan aparat penegak hukum terhadap kekerasan seksual membuat akses keadilan bagi korban incest tetap terbatas.

Di sisi lain, Swedia yang dikenal memiliki sistem hukum yang progresif, telah menetapkan pengaturan yang menyeluruh terkait kejahatan seksual melalui *Swedish Penal Code (Brottsbalken/BrB)*, terutama dalam Chapter 6 yang membahas Tindak Pidana Seksual. Dalam peraturan tersebut, incest dipandang sebagai pelanggaran berat, tanpa memandang usia korban maupun adanya persetujuan. Beberapa pasal kunci dalam hukum Swedia yang berhubungan dengan hal ini adalah: Chapter 6, Section 6 BrB: menyatakan bahwa hubungan seksual dalam lingkungan keluarga dekat—termasuk orang tua dan anak kandung—adalah tindak pidana incest, tanpa pengecualian. Swedia menerapkan prinsip hukum yang berfokus pada persetujuan dalam aktivitas seksual (*consent-based legislation*), yang semakin ditegaskan melalui perubahan undang-undang pada tahun 2018. Berdasarkan sistem ini, hubungan seksual hanya diakui sah apabila terdapat persetujuan yang jelas dan diberikan secara sukarela. Akan tetapi, pada kasus incest, persetujuan tersebut tidak diakui secara hukum karena terdapat hubungan kekuasaan serta ikatan keluarga yang secara etika dan hukum tidak dapat dijadikan dasar persetujuan.

Pendekatan hukum Swedia sangat menekankan perlindungan korban. Prinsip *barnets bästa* (kepentingan terbaik anak) diadopsi dalam setiap aspek sistem peradilan pidana, dan negara menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan perlindungan fisik bagi anak korban kekerasan seksual. Hal ini berbeda dengan situasi di Indonesia, di mana upaya perlindungan bagi korban umumnya masih bersifat terbatas dan lebih banyak dilakukan sebagai respons setelah terjadinya kasus.

Perbandingan antara Indonesia dan Swedia dalam penanganan perkara incest menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia saat ini mampu menjamin keadilan substantif bagi korban, khususnya anak-anak. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual dalam keluarga meningkat dari tahun ke tahun, dan mayoritas pelakunya adalah ayah kandung atau ayah tiri. Namun, penanganan kasus tersebut masih menghadapi banyak hambatan institusional dan sosial.

Dari sudut pandang pendekatan hukum, Indonesia dan Swedia merepresentasikan dua corak yang sangat berbeda. Indonesia saat ini masih dalam tahap bertransformasi dari sistem hukum peninggalan kolonial yang cenderung formalistik menuju sistem yang lebih berorientasi pada kepentingan korban dan bernuansa progresif. Sebaliknya, Swedia telah lebih dulu mengadopsi pendekatan yang berlandaskan hak asasi manusia dengan pelaksanaan penegakan hukum yang stabil dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Fokus utama penelitian adalah mengkaji pengaturan hukum pidana mengenai kekerasan seksual berupa persetubuhan antara orang tua dan anak kandung (*incest*) di Indonesia dan Swedia, serta membandingkan mekanisme penyelesaian hukum pidana yang berlaku di kedua negara.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): menelaah peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan terkait lainnya. Pada konteks Swedia, penelitian menelaah *Brottsbalken* (Swedish Criminal Code), khususnya Bab 6 tentang Tindak Pidana Seksual. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*): membandingkan norma hukum, mekanisme penyelesaian perkara, serta perlindungan korban dalam kasus incest di Indonesia dan Swedia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): menelaah konsep-konsep kunci seperti incest, kekerasan seksual, perlindungan anak, serta *restorative justice* yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Bahan hukum primer: KUHP Indonesia, UU TPKS 2022, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Brottsbalken* (Swedish Penal Code), Lag (1999:997) om *särskild företräddare för barn*, dan Lag (1988:609) om *målsägandebiträde*. Bahan hukum sekunder: literatur, jurnal, artikel hukum, laporan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan (Indonesia) dan *Brå* (Dewan Nasional Swedia untuk Pencegahan Kejahatan). Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring resmi yang mendukung penjelasan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri undang-undang, putusan pengadilan, jurnal hukum, laporan tahunan lembaga perlindungan anak, serta publikasi ilmiah lainnya yang relevan. Teknik Analisis Bahan Hukum Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif. Pertama, menggambarkan dan menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai incest di Indonesia dan Swedia. Kedua, membandingkan titik persamaan dan perbedaan, baik dari segi norma hukum, proses penyelesaian perkara, maupun perlindungan korban. Analisis kemudian diarahkan untuk menemukan kelemahan, kelebihan, serta rekomendasi perbaikan bagi sistem hukum Indonesia dalam menangani perkara incest.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa saja yang menjadi titik perbedaan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual persetubuhan orang tua dan anak kandung antara Indonesia dan Swedia

Perbedaan utama antara Indonesia dan Swedia dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual incest terletak pada dasar hukum dan definisi yang digunakan. Indonesia masih menggunakan KUHP lama Pasal 294 ayat (1) dan sebagian mengacu pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2022, dengan orientasi delik aduan, sehingga proses hukum seringkali baru berjalan apabila ada laporan dari korban atau keluarga. Sebaliknya, Swedia melalui Brottsbalken (Swedish Penal Code) Bab 6 menempatkan incest sebagai kejahatan serius yang diproses *ex officio* tanpa perlu adanya pengaduan, dan tidak mengakui persetujuan dalam relasi orang tua-anak karena adanya ketidaksetaraan kuasa.

Dari segi perlindungan korban, Indonesia cenderung masih fokus pada pendampingan hukum dan pemberian rasa aman selama proses peradilan, yang dalam praktiknya kerap terbatas akibat faktor budaya patriarki dan lemahnya aparat penegak hukum. Sementara itu, Swedia mengadopsi prinsip *barnets bästa* (kepentingan terbaik anak), dengan dukungan rehabilitasi psikologis, sosial, dan medis yang komprehensif melalui sinergi antara negara dan lembaga perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa Swedia lebih progresif dalam menjamin pemulihan korban dibandingkan dengan Indonesia yang masih dalam tahap transisi sistem hukum kolonial menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Dari sisi pemidanaan, Indonesia menerapkan ancaman pidana penjara 7–12 tahun tergantung unsur pemaksaan atau perkosaan. Namun, sanksi ini sering kali tidak disertai larangan hak asuh atau perlindungan jangka panjang bagi korban. Sebaliknya, Swedia menjatuhkan hukuman pidana berat disertai kemungkinan pencabutan hak asuh dan larangan kontak dengan korban, sehingga lebih menjamin keselamatan anak pasca putusan. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa sistem hukum Swedia lebih responsif dan berpihak pada korban, sedangkan Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan kultural yang mengurangi efektivitas perlindungan anak korban incest.

Selain aspek normatif, perbedaan penyelesaian perkara incest di Indonesia dan Swedia juga dapat dilihat dari cara kedua negara memaknai konsep persetubuhan dan kekerasan seksual. Indonesia masih mendefinisikan persetubuhan secara sempit, yaitu terbatas pada penetrasi penis ke dalam vagina, yang menyebabkan kasus kekerasan seksual lain seperti pelecehan seksual non-penetratif sering kali tidak terakomodasi dalam KUHP. Sebaliknya, Swedia menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan menitikberatkan pada *consent-based legislation*, sehingga setiap tindakan seksual tanpa persetujuan yang jelas dapat diproses sebagai tindak pidana, meskipun tidak terjadi penetrasi. Perbedaan definisi ini sangat memengaruhi efektivitas hukum dalam melindungi korban.

Aspek lain yang menonjol adalah mekanisme pelaporan. Indonesia masih menganut prinsip delik aduan, yang berarti penegakan hukum sangat tergantung pada keberanian korban atau keluarganya untuk melapor. Hal ini sering menimbulkan hambatan karena korban anak dalam kasus incest biasanya berada dalam posisi terintimidasi atau takut stigma sosial, sehingga banyak kasus tidak sampai ke pengadilan. Sebaliknya, Swedia menerapkan sistem *ex officio* yang memungkinkan aparat penegak hukum memproses kasus begitu ada indikasi, tanpa menunggu laporan korban. Mekanisme ini terbukti meningkatkan angka terungkapnya kasus kekerasan seksual dalam keluarga.

Dari sisi perlindungan korban, Indonesia baru mulai mengintegrasikan layanan pendampingan psikologis dan sosial melalui UU TPKS 2022. Namun, implementasinya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Banyak kasus menunjukkan korban justru mengalami reviktimisasi ketika harus menghadapi aparat hukum yang kurang peka atau proses peradilan yang berbelit. Swedia, sebaliknya, telah lama membangun sistem layanan sosial yang berbasis hak anak, di mana korban incest mendapat dukungan lintas sektor termasuk psikolog,

pekerja sosial, dan organisasi perlindungan anak. Pendekatan holistik ini mempercepat pemulihan trauma dan mencegah kerusakan jangka panjang bagi korban.

Dalam hal tujuan pemidanaan, Indonesia lebih menitikberatkan pada penjeraan dan penghukuman pelaku, meskipun belum sepenuhnya mengutamakan pemulihan korban. Hukuman penjara dianggap sebagai bentuk balasan negara terhadap kejahatan, namun tidak selalu diikuti oleh jaminan keselamatan anak setelah pelaku bebas. Sementara itu, Swedia menggabungkan antara aspek penghukuman dan pencegahan dengan menambahkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak asuh, larangan kontak, serta program rehabilitasi pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang diadopsi dalam konteks perlindungan anak.

Terakhir, konteks sosial budaya juga berperan besar dalam membedakan efektivitas sistem hukum kedua negara. Indonesia masih menghadapi pengaruh kuat budaya patriarki yang sering menormalisasi dominasi orang tua, khususnya ayah, sehingga korban anak kesulitan mengakses keadilan. Banyak keluarga memilih menyelesaikan kasus secara internal demi menjaga “nama baik”. Di Swedia, kesadaran gender dan perlindungan anak sudah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat. Keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan seksual lebih tinggi, karena ada jaminan dukungan dari negara dan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara incest bukan hanya soal regulasi, tetapi juga terkait kesiapan sosial dan budaya dalam mendukung hak anak korban kekerasan seksual. Agar pembaca lebih bisa memahami terkait perbedaan yang spesifik, maka kami rangkumkan dalam tabel perbandingan berikut ini

NO	PERBANDINGAN	INDONESIA	SWEDIA
1.	Hukum Yang Berlaku	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<i>Brottsbalken (Swedish Criminal Code)</i>
2.	Definisi Anak Kandung	Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang memiliki hubungan darah dengan orangtuanya	Anak adalah orang yang berumur dibawah 15 tahun yang memiliki hubungan darah dengan orangtuanya
3.	Definisi Orang tua	Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat yang sah menurut hukum, yang bertanggung jawab terhadap anak.	Orang tua adalah orang yang berfokus pada aspek hak dan tanggung jawab pengasuhan, seperti hak asuh, pengambilan keputusan, dan larangan kekerasan terhadap anak.
4.	Kekerasan seksual	kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan dengan unsur kekerasan, pemaksaan, atau ancaman yang memenuhi unsur tindak pidana seksual	Seseorang yang dengan kekerasan, ancaman pidana, atau cara lain memaksa orang lain melakukan hubungan seksual atau perbuatan seksual lain yang setara dengan hubungan seksual dapat dijerat dengan pasal pemerkosaan (rape)

5.	persetubuhan	persetubuhan diartikan sebagai pertemuan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan masuknya penis ke dalam vagina, meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma.	Persetubuhan adalah hubungan penetratif vaginal antara individu lawan jenis (<i>samlag</i>).
6.	Proses hukum	Dilakukan dengan delik aduan oleh pihak korban. Keluarga lainnya ataupun pihak lain.	Kasus diproses secara otomatis (<i>ex officio</i>) tanpa perlu pengaduan dari korban. Pemeriksaan anak dapat dilakukan tanpa persetujuan pelaku orangtua.
7.	Tujuan penegakan hukum	perlindungan hak asasi anak, penegakan keadilan serta pencegahan tindak pidana kekerasan seksual	Melindungi hak dan keamanan anak serta menindak tegas pelaku kekerasan seksual, termasuk orangtua kandung.
8.	Perlindungan dan rehabilitasi korban	Korban mendapat pemberian rasa aman, pendampingan hukum, dan perlindungan selama proses peradilan agar korban tidak mengalami trauma tambahan.	Korban mendapat pendampingan psikologis, sosial, dan medis dari layanan sosial dan lembaga perlindungan anak. Pemerintah dan organisasi terkait bekerja sama untuk pemulihan dan keamanan anak.
9.	Putusan dan eksekusi hukuman	Hukuman penjara paling lama 7 tahun (Pasal 294 ayat 1 KUHP) untuk pencabulan. Untuk kasus kekerasan dengan ancaman atau perkosaan, hukuman bisa mencapai 12 tahun (Pasal 285 KUHP).	jika terbukti bersalah, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana berat, termasuk kemungkinan larangan kontak dan pencabutan hak asuh pelaku.

Bagaimana pengimplementasian penyelesaian perkara kekerasan seksual persetubuhan orang tua dan anak kandung di masing2 negara?

Pengimplementasian Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia

Saat ini, konsep penyelesaian untuk kekerasan seksual pada anak menerapkan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut dengan *restorative justice* lebih banyak di aplikasikan untuk mengatasi pelanggar hukum yang masih tergolong anak. Prinsip ini merupakan perpaduan hasil eksplorasi dan komparasi antara pendekatan kesejahteraan anak dan pendekatan keadilan. *Restorative justice* merupakan konsep penyelesaian yang didasari pada prinsip *due process* dengan menghormati hak-hak hukum tersangka salah satunya yaitu seorang tersangka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum adanya vonis yang dijatuhkan oleh Hakim (*presumption of innocent*) serta hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim harus

setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan. Selain itu, keadaan anak menjadi hal yang patut diperhitungkan dengan pengimplementasian melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi yang tidak mengesampingkan hak asasi anak. Landasan hukum sebagai pedoman dalam melakukan penegakan hukum bagi anak yang berkonflik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep diversifikasi dalam UU SPPA merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing pelaku anak agar tidak merusak perkembangan mental ataupun psikis. Diversifikasi merupakan suatu pengganti proses penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses penegakan hukum secara formal ke penyelesaian secara non formal melalui dialog antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Polisi, Jaksa, Hakim, serta Pembimbing Kemasyarakatan. Sebagai landasan dalam penegakan tindak pidana kekerasan, UU TPKS juga mengatur penyelesaian tindak pidana diluar proses peradilan bagi pelaku anak.

Selain penyelesaian perkara kekerasan seksual pada anak secara restoratif (*restorative justice*) juga ada penyelesaian perkara seksual pada anak secara restitusi. Restitusi atau pengembalian keadaan adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atas kerugian yang diderita akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, restitusi menjadi instrumen penting dalam memberikan keadilan bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur bahwa pelaku harus membayar restitusi yang mencakup biaya perawatan medis, rehabilitasi psikologis, serta kerugian ekonomi akibat dampak kejahatan tersebut. Melalui kewajiban pemulihan dan perbaikan atas dampak yang ditimbulkan sebagaimana asas *restitutio in integrum* yaitu merupakan salah satu asas hukum yang memiliki artipemulihan pada kondisi semula. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam *Basic Principles and Guide on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Right and Humanitarian Law* yang menyatakan bahwa korban memiliki hak pemulihan atau reparasi yaitu: Restitusi, Kompensasi, Rehabilitasi, Kepuasan (*satisfaction*), dan jaminan ketidak berulangan (*non recurrence*).

Pengimplementasian Penanganan Kekerasan Seksual di Swedia

1. Pelaporan dan Penyelidikan

Proses penyelesaian perkara dimulai dengan laporan dari korban atau pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Di Swedia, sistem pelaporan mengenai kekerasan seksual dirancang agar terbuka dan mendukung korban untuk melaporkan peristiwa tersebut tanpa merasa takut terkena stigma sosial. Polisi serta lembaga terkait memiliki protokol khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk memberikan perlindungan kepada korban selama proses penyelidikan berlangsung. Penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan mengumpulkan berbagai bukti fisik, keterangan dari saksi, serta pemeriksaan psikologis terhadap korban. Undang-Undang Hukum Pidana Swedia (*Swedish Penal Code*) memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi secara menyeluruh agar dapat memastikan keadilan bagi korban.

2. Perlindungan Korban

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan penyelesaian perkara adalah perlindungan bagi para korban. Swedia memiliki sistem perlindungan yang kuat terhadap korban, yang mencakup pemberian layanan konseling, perlindungan hukum, serta bantuan sosial. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengurangi dampak trauma dan memberikan dukungan yang diperlukan agar korban dapat melalui proses hukum dengan lebih baik.

3. Proses peradilan

Setelah penyelidikan selesai, kasus tersebut akan dikirim ke pengadilan. Dalam proses peradilan, hakim akan meninjau semua bukti yang ada serta mendengarkan keterangan dari semua pihak terlibat. Undang-Undang KUHP Swedia menetapkan sanksi hukuman yang cukup ketat terhadap pelaku kekerasan seksual, seperti hukuman penjara yang cukup lama dan denda. Pengadilan

Swedia juga menerapkan prinsip keadilan restoratif, yang memungkinkan adanya mediasi serta pemulihan hubungan sosial. Namun, dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga, pendekatan ini harus dilakukan secara hati-hati dan tetap memperhatikan kepentingan korban.

4. Pendekatan Interdisipliner : Model Barnahus

Salah satu inovasi terpenting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Swedia adalah model Barnahus (Children's House). Barnahus merupakan pusat yang menggabungkan berbagai lembaga seperti kepolisian, jaksa, petugas layanan sosial, serta para profesional kesehatan, yang bekerja sama dalam satu tempat. Tujuan utamanya adalah mengurangi trauma yang dialami anak korban. Dengan adanya semua pihak terkait di lokasi yang sama, anak tidak perlu berkali-kali berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain untuk memberikan kesaksian, menjalani pemeriksaan medis, atau mendapatkan bantuan konseling. Model Barnahus memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar-instansi, sehingga penanganan kasus dapat berjalan secara efektif, serta lebih menekankan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Special Representative for Children (1999:997) memastikan bahwa persetujuan untuk tindakan proses seperti pemeriksaan medis dan lainnya tidak bergantung pada orang tua atau tersangka. Di sisi lain, målsägandebitråde (1988:609) mendampingi korban melalui wakilnya untuk memastikan hak partisipasi, klaim kompensasi, dan pemenuhan informasi selama proses hukum berlangsung. Kedua pendekatan ini memastikan adanya keadilan yang ramah anak, meskipun pelaku tindakan tersebut adalah orang tua. Dengan adanya Barnahus, anak mendapatkan dukungan psikososial secara bersamaan dengan proses pidana; wawancara forensik dan pemeriksaan medis dijadwalkan secara terkoordinasi; serta pertemuan antar lembaga menyusun tindak lanjut perlindungan anak, seperti intervensi dari layanan sosial. Standar resmi menekankan upaya pencegahan re-traumatisasi dan memastikan kualitas bukti yang diperlukan dalam proses pengadilan.

KESIMPULAN

Perbandingan sistem penyelesaian hukum pidana perkara kekerasan seksual berupa persetujuan antara orang tua dengan anak kandung di Indonesia dan Swedia menunjukkan adanya kesamaan maupun perbedaan penting dalam pengaturannya. Di Indonesia, aturan utama mengenai perkara ini diatur dalam KUHP (Pasal 285, 287, 294), UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Regulasi ini menyatakan bahwa persetujuan orang tua dengan anak kandung dianggap sebagai bentuk incest yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dengan ancaman pidana yang cukup berat, terutama karena hubungan darah dan perbedaan posisi kuasa. Selain itu, dalam penyelesaian perkara, pihak penegak hukum juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban, baik melalui pendampingan psikologis maupun upaya pemulihan sosial. Di Swedia, ketentuan hukum mengenai perkara ini diatur dalam Swedish Penal Code (Brottsbalken, Chapter 6, Sections 4 dan 6). Negara ini secara tegas mengatur tindakan persetujuan dengan anak kandung atau eksploitasi seksual anak sebagai tindak pidana. Setelah reformasi hukum pascareformasi 2018, Swedia menerapkan pendekatan berbasis persetujuan, yang menjadikan elemen persetujuan sebagai bagian utama dari penentuan kejahatan. Selain itu, kondisi kerentanan anak juga menjadi landasan utama dalam penentuan hukuman. Negara ini juga memiliki sistem perlindungan anak yang kuat, melalui layanan sosial serta kewajiban pelaporan oleh para profesional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua negara sama-sama menganggap tindakan persetujuan antara orang tua dan anak kandung sebagai kejahatan yang sangat serius. Namun, kedua negara memiliki orientasi yang berbeda dalam pendekatannya. Indonesia lebih menekankan aspek moral, hubungan darah, serta perlindungan anak dalam konteks keluarga, sementara Swedia lebih berfokus pada prinsip persetujuan, kondisi kerentanan anak, serta perlindungan yang berlandaskan hak asasi manusia.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki dasar hukum dan konteks sosial budaya yang berbeda, kebijakan hukum di kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan melindungi anak dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriani, L. (2020). *Hukum Pidana dalam Perspektif Gender*. Jakarta: Kencana.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- SOU (2010:71). *Sexualbrottslagstiftningen: Ett skydd för utsatta och ett effektivt brottsofferperspektiv*. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar.

Jurnal

- Alamsyah, R. (2023). "Implementasi UU TPKS dalam Penanganan Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53(1).
- Allred, P., & David, M. (2020). The criminalization of sexual violence: Consent, coercion and contemporary debates in Europe. *Journal of Gender-Based Violence*, 4(1), 45–62. <https://doi.org/10.1332/239868020X15857383104013>
- Arifin, R., & Nugroho, S. (2023). Tantangan penegakan hukum dalam kasus incest di Indonesia: Antara norma hukum dan budaya patriarki. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5>
- Andersson, M. (2021). *Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Swedia: Perspektif Hukum dan Sosial*. Stockholm: Juristförlaget, hlm
- Burman, M., & Wennberg, S. (2020). Sexual offences in Swedish law: Critical perspectives on consent and coercion. *Nordic Journal on Law and Society*, 3(2), 63–84. <https://doi.org/10.36368/njls.v3i02.88>
- Huda, C. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif UU TPKS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 245–266. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2968>
- Otoritas Kompensasi dan Dukungan Korban Kejahatan Swedia. *Layanan Dukungan untuk Korban Kekerasan Seksual*. Stockholm: SCVCSA, 2023, hlm. 10-35.
- Sari, N. K., & Utami, P. (2022). Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan kekerasan seksual incest di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 33–49. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.33-49>
- Svensson, E., & Carlsson, Y. (2021). Children's rights and protection in cases of intra-familial sexual abuse: The Swedish legal response. *Child Abuse & Neglect*, 117, 105055. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105055>
- Siedy Aprilia Utami, Y.A. Triana Ohoiwutun & Ainul Azizah, *Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Yang Berkepastian Hukum, KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4 (2024),

Peraturan Perundang – Undangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120).
- Brottsbalken (Swedish Penal Code), Chapter 6: Sexual Crimes, SFS 1962:700

Sumber Lain Nya

- Asep Berlian Lesmana, *Implementasi Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Manokwari*, skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Barnahus / PROMISE Standards : Council of Europe – The development of Barnahus in Sweden, *Barnahus Quality Standards (PROMISE)*, Laman Barnahus.eu.
- EIGE (2020). *Gender-based Violence: Victim Support Services in Europe*. European Institute for Gender Equality. Diakses dari: <https://eige.europa.eu>
- Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn (Special Representative for Children)
- Lag (1988:609) om målsägandebiträde (Counsel for the Injured Party)
- Swedish Government (2018). *Consent legislation enters into force*. Diakses dari: <https://www.government.se>.